

PERBANDINGAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI NEGARA ASEAN

Adiel INK Tambingon¹, Andi Yusuf Katili², Arlin Nandita Yasin³, Akhdan
Ramadhan Badjeber⁴

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

adieltambingon.ink@gmail.com¹, yusuf2801@gmail.com²,
arlinyasin0@gmail.com³, adanbadjeber016@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan perbandingan sistem pemerintahan demokrasi negara ASEAN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa umumnya anggota-anggota negara ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) mengalami perkembangan dunia terhadap kerjasama dalam berbagai bidang sosial, politik dan budaya. Komunitas negara ASEAN bertujuan untuk mewujudkan dan memperjuangkan Asia Tenggara sebagai wilayah yang aman, nyaman, damai, bebas dan netral. Pada hakikatnya setiap anggota negara ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan demokrasi yang mencolok dapat dilihat dengan adanya pemilihan negara yang dipilih langsung oleh rakyat. Sistem pemerintahan demokrasi negara ASEAN sesungguhnya cukup beragam pada setiap negara. Oleh sebab itu dalam penelitian dan analisis ini berfokus pada anggota negara ASEAN yang sistem pemerintahannya demokrasi seperti negara Indonesia, Vietnam, Myanmar, Singapura, Laos dan Filipina.

Kata Kunci: **Perbandingan, Pemerintahan, Demokrasi, ASEAN**

ABSTRACT

This study aims to identify and describe a comparison of democratic governance systems in ASEAN countries. The method used in this study is descriptive comparative with a qualitative approach. Data collection was carried out through literature studies related to this research. The results of the study show that in general the members of the ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) countries experience global developments towards cooperation in various social, political and cultural fields. The ASEAN community of countries aims to realize and fight for Southeast Asia as a region that is safe, comfortable, peaceful, free and neutral. In essence, each member of ASEAN countries has a different system of government. A striking system of democratic government can be seen in the presence of state leaders who are directly elected by the people. The democratic governance systems of ASEAN countries are actually quite diverse in each country. Therefore, this research and analysis focuses on ASEAN member

Adiel INK Tambingon, Cs: Perbandingan Sistem Pemerintahan Page. 58

countries with democratic government systems such as Indonesia, Vietnam, Myanmar, Singapore, Laos and the Philippines.

Keywords: **Comparison, Governance, Democracy, ASEAN**

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh negara Indonesia, artinya sebagai pemerintahan berasal dari rakyat, oleh rakyat dan pula untuk rakyat. Demokrasi di Indonesia sudah mendarah daging pada diri negara Indonesia. Negara Indonesia wajib memprioritaskan rakyat dalam seluruh sistem pemerintahan, segala sesuatu usaha maupun kebijakan yang akan diterapkan nanti di negara Indonesia wajib mengutamakan kepentingan rakyat. Dalam sejarah, pada zaman Yunani kuno khususnya wilayah Athena merupakan negara yang pertama kali menerapkan sistem demokrasi. Kata "demos" artinya rakyat, dan "kratos/kratein" artinya kekuasaan, kata tersebut lahir dari bahasa Yunani. Sama halnya dengan ahli atau pakar yaitu John Dewey dan Abraham Lincoln, yang hingga saat ini menerapkan demokrasi dalam lingkup kehidupan berbangsa bernegara (Rohman, 2019).

Kebebasan merupakan gagasan utama terhadap penerapan demokrasi. Kebebasan dalam berbagai bentuk untuk menentukan peraturan dan perundang-undangan, dan kebebasan menyampaikan suatu pendapat argumentasi di muka umum. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Ir. Soekarno Hatta tentang kemerdekaan. Menerapkan sistem pemerintahannya yaitu demokrasi. Rakyat diberi izin untuk dapat berpartisipasi dan berperan aktif dalam urusan negara maupun urusan politik. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan yang tertinggi, berlakunya pemilihan umum wakil-wakil rakyat dipilih oleh rakyat itu sendiri, agar rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya di setiap lembaga pemerintahan sesuai peraturan berlakunya kompetensi yang sehat. Rakyat negara Indonesia yang memiliki banyak keragaman terdiri dari adanya suku, ras, agama, suku bangsa dan adat istiadat, pulau yang banyak, hingga kepentingan yang berbeda-beda, mampu menghasilkan negara Indonesia menjadi negara yang heterogen. Yang menjadi semboyan atau motto negara Indonesia adalah Bhineka Tunggal Ika, yang artinya "Berbeda-Beda Tetapi Satu Juga" Sebagai warga negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu juga, belum dapat terlaksana dengan baik.

Akibatnya, masih banyak masalah atau kasus-kasus yang perlu ditinjau dan diperbaiki lagi untuk diselesaikan. Baik masalah dalam negara maupun luar negara yang dapat merusak berbagai sistem pemerintahan Indonesia. Contoh yang dapat diambil dari masalah dalam negara sama halnya dengan kasus korupsi,

melibatkan para pejabat negara serta wakil-wakil rakyat dari lembaga pemerintahan. Dengan kata lain, terguncangnya rakyat Indonesia akan kepercayaan terhadap para pejabat negara dan wakil-wakil rakyat tersebut. Negara Indonesia pun belum dapat menjamin akan hal tersebut, kemudian membuat masyarakat melakukan segala macam aksi demo terhadap pemerintah.

Pelopor aksi demo bukan hanya melibatkan mahasiswa saja, akan tetapi dari berbagai kalangan masyarakat pun ikut turun aski demo demi kepentingan dan tujuan yang sama. Bukan terjadi hanya di satu wilayah saja, tetapi di seluruh wilayah negara Indonesia. Dalam negara Indonesia saja belum bisa menjamin masalah tersebut, maka negara Indonesia masuk ke dalam organisasi ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia yang demokrasi dan negara ASEAN lainnya memiliki sistem pemerintahan masing-masing berebeda. Negara ASEAN yang di dalamnya beranggotakan 10 negara. Terdapat perbandingan sistem pemerintahan demokrasi, kerajaan, otoriter, presidensial, moneter dan lain-lain. Demi menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang aman dan mengedepankan segala cara perdamaian antar sesama anggotanya. Konflik dan permasalahan yang ada organisasi bisa saling membantu mewujudkan perdamaian abadi. Jika, ditinjau dengan permasalahan yang ada, demokrasi ternyata belum dilaksanakan dengan baik.

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan penelitian terhadap perbandingan sistem pemerintahan negara ASEAN, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Ada suatu metode menurut (Nazir, 2005) (Asean & Wangke, 2015) untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu sert kondisi, suatu sistem pemikiran, dan suatu kelas peristiwa pada zaman sekarang. Kemudian, tujuan penelitian deskriptif ini ialah untuk membentuk suatu deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena akan dicari. Penelitian komparatif dapat membandingkan segala fenomena tertentu, membandingkan satu variabel bahkan lebih terhadap sampel yang berbeda juga pada waktu yang berbeda (Iii & Penelitian, 2006). Proses yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah: pertama, menyiapkan berbagai jurnal, artikel, buku, berbagai referensi yang ada.

Setelah itu, wajib dibaca, dianalisis, dan dipelajari dengan baik sehingga memperoleh manfaat, ilmu dan wawasan terhadap perbandingan negara ASEAN yang di dalamnya memiliki banyak argumentasi, ide-ide yang dapat diperoleh. Selanjutnya, dibahas dan disusun secara jelas seluruh referensi yang sudah disiapkan ialah perbandingan sistem pemerintahan negara ASEAN. Berikutnya,

mencari perbedaan dan persamaan antara sistem pemerintahan negara Indonesia dengan negara ASEAN lainnya. Untuk menghasilkan proposisi dan konsep yang baik berupa penafsiran, pengertian, preskripsi maupun klasifikasi yang berbeda-beda. Proses akhirnya dengan menarik seluruh kesimpulan yang menjawab semua masalah perbandingan negara ASEAN dengan negara Indonesia berdasarkan sistem pemerintahannya, sekaligus memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibuat dan disusun di dalam kesimpulan.

HASIL PEMBAHASAN

Terbentuknya Sistem Pemerintahan Demokrasi Negara ASEAN

Negara Indonesia yang termasuk ke dalam Negara ASEAN merupakan kerjasama regional pada 8 Agustus 1967 atas kesepakatan bersama antara lima negara yaitu Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura dan Indonesia dikenal sebagai deklarasi Bangkok 1967. Meskipun masing-masing negara ASEAN berbanding beda satu sama lain, baik itu tentang budaya, agama, ras, dan secara geografi berbeda (Bangun, 2019). Tetap dapat mempertahankan rasa kepercayaan, kekompakan dan kerjasama antar negara ASEAN. Keamanan nasional dan internasional kawasan ASEAN seiring berkembangnya waktu mengalami banyak perkembangan yang cukup pesat, kerjasama ASEAN tidak hanya menangani permasalahan ekonomi dan sosial budaya, akan tetapi menjalar sampai di bidang politik dan keamanan. Peran Presiden Soeharto yang mengedepankan masalah politik luar negeri bertetangga baik, pada masa orde baru untuk melakukan kerjasama yang baik dan tidak agresif. Indonesia pada pemerintahan orde lama yang memilih politik konfrontasi dengan negara Malaysia pada tahun 1967. Ahli kekuasaan pada era Soeharto dan dilakukannya reformasi dengan menghentikan konfrontasi dengan Negara Malaysia. Pada masa itu berbagai pembangunan ekonomi mendukung kerja sama regional dan merencanakan kawasan damai, aman dan sejahtera tidak ada perselisihan maupun perang. Hasilnya, dalam pertemuan dengan negara-negara pendiri ASEAN yaitu Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura di Bangkok.

Negara Indonesia ikut merencanakan pembentukan organisasi kawasan tersebut. Indonesia yang termasuk sebagai kawasan besar di Asia Tenggara memiliki pengaruh besar. Perbandingan antara negara Indonesia dan anggota-anggota negara ASEAN lainnya, kecuali Thailand adalah kawasan pada masa penjajahan yang pernah dikuasai kolonialisme negara-negara barat atau Eropa. Akhirnya, negara-negara ASEAN, kecuali Thailand mewarisi budaya dan mempengaruhi struktur maupun bentuk sistem pemerintahan kolonialisme atau kerajaan di kawasan Asia Tenggara tersebut. Setelah anggota negara ASEAN telah merdeka, terjadi perebutan negara-negara kekuatan utama di seluruh dunia.

Ketika perang dingin terjadi dengan ditandainya macam-macam persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, beberapa negara Asia Tenggara masuk ke dalam Blok Barat, Blok Timur sebagai pengikut dan pendukung. Baik secara nyata maupun tidak nyata, langsung tidak langsung. Maka, berbagai perbandingan sistem pemerintahan negara ASEAN yang berbeda-beda, terdapat 6 (enam) negara ASEAN yang sistem pemerintahannya demokrasi diuraikan sebagai berikut:

Myanmar

Myanmar adalah salah satu dari beberapa negara asean yang masih dikuasai oleh rezim militer yang otoriter. Kehidupan politik, sosial, dan ekonomi, masih di kuasai oleh kelompok militer sudah 40 tahun lamanya. Pada saat pemimpin Myanmar menggantikan nilai-nilai demokrasi dengan tatanan yang bersifat sentralistik dan otoriter maka dari situlah awal mulanya negara Myanmar dikuasai oleh rezim militer yang otoriter, pada saat negara Myanmar dipimpin oleh Jenderal Ne Win dan sampai Jenderal Than Shwe mereka sama-sama menjalankan tatanan kebijakan yang sama yaitu dengan memberantas nilai-nilai demokrasi (Yasman et al., 2003). Dengan berkuasanya rezim militer apapun gerakan demokrasi yang timbul dari rakyat Myanmar pasti mendapat perlawanan dari rezim yang berkuasa, pada dasarnya rezim militer yang berkuasa ini bisa melemahkan apa saja gerakan yang timbul dari masyarakat. Belajar dari negara-negara yang sebelumnya menjalankan tatanan negara yang otoriter dan sekarang telah menjadi negara yang demokrasi, para pengamat politik internasional memiliki rasa optimisme yang sangat besar mengenai cerah prospek demokratisasi di dunia. Dengan bubar nya organisasi Uni Soviet pada awal tahun 1990-an para pengamat meyakini bahwa gelombang demokratisasi akan menyebar ke seluruh dunia dan penyebaran tersebut tidak dapat dibendung.

Singapura

Singapura atau yang dikenal dengan sebutan The Lion City. Singapura adalah salah satu dari negara-negara kecil yang paling maju dilingkup ASEAN. Pada tahun 1965, negara Singapura merasa mampu dan menarik diri dari federasi agar negara Singapura membentuk negara terpisah. Negara Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer yang dimana dipimpin oleh seorang perdana menteri, pada saat Singapura menarik diri dari federasi Singapura menjadi negara yang mandiri yang dipimpin Perdana Menteri Lee Kuan Yew (seorang tokoh pembangunan negara Singapura modern). Dalam pemerintahan Singapura menganut sistem pemerintahan parlementer tetapi negara Singapura adalah negara yang demokrasi hanya saja dalam sistem pemerintahannya yang menganut sistem parlementer, maksudnya pemerintahannya saja yang berbentuk parlementer dan demokratis perwakilan dari publik. Kepala negara dan pemerintahan negara

Singapura berada di bawah naungan perdana menteri, menteri-menteri yang menjabat bertanggung jawab penuh kepada parlemen, dan presiden hanyalah kepala negara jadi seluruh kedudukan di parlemen yang memegangnya adalah perdana Menteri. (KNBS, 2021).

Philipina

Philipina, negara kepulauan yang menganut sistem pemerintahan republik. Dalam kalangan masyarakat Philipina terjadi pro dan kontra terhadap politik dinasti atau kekuasaan turun temurun yang selama ini dijalankan oleh negara Philipina. Politik dinasti ini sudah menjadi sandungan dalam pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi yang sudah dianut negara Philipina. Politik dinasti ini akan menjadi ancaman bagi sistem demokrasi, dimana hanya akan mencalonkan calon-calon pemimpin yang notabennya berasal dari keluarga-keluarga mantan penguasa sebelumnya. Dan ancaman lainnya yaitu masyarakat cenderung tidak peduli dengan potensi yang dimilikinya untuk menjadi pemimpin, karena sistem pemerintahannya sudah cacat bila hal yang menjadi isu-isu terjadi karena pemimpin tidak lagi dipilih oleh rakyat melainkan dipilih berdasarkan garis keturunan atau keluarga. (KNBS, 2021), (Pasan, 2013)

Vietnam

Vietnam merupakan negara Asia yang terletak paling Timur di semenanjung Indochina, bentuk pemerintahannya sekarang sistem republik komunis yang dimana hanya satu partai yang berada di negara ini. Kepala negara dan perdana menterinya tergolong dalam satu partai sehingga kepala negara tidak lepas tangan dari perdana menteri yang memiliki kekuasaan lebih utuh dari kepala negara. Namun, seiring berjalannya waktu, negara Vietnam mengalami pergeseran komponen ideologi, dimana pada tahun 1986 Vietnam memperkenalkan kebijakan baru bernama Doi Moi yang berdampak besar pada sistem ekonomi negara dari para kaum komunisme. Akan tetapi sampai sekarang Vietnam tetap menjadi negara komunis. Namun secara ideologi, paham komunisme di negara tersebut telah ditinggalkan. (Bangun, 2019).

Laos

Partai revolusiner rakyat Laos. Laos memiliki satu partai yang diakui kekuatannya dalam pemerintahan sebab dari tahun 1975 partai komunis ini yang memerintah di negara Laos. Sistem pemerintahan Laos yaitu sistem presidensial dan parlemen, yakni kabinet parlementer dengan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan yang kemudian diutus kepala negara oleh parlemen masa jabatan 5 tahun. Pada bulan agustus tahun 1991 dalam sidang ke 6 majelis rakyat tertinggi dibentuklah UUD pertama, UUD menetapkan bahwa republik demokratis rakyat Laos adalah negara demokratis, semua hak milik rakyat, rakyat berbagai etnis

menjalankan hak tuan rumah di bawah pimpinan partai revolusiner rakyat Laos, meski begitu kekuasaan partai tetap dipertahankan dan ideologi komunis marxis tetap dipegang teguh. Semua itu ditinjau dari perekrutan anggota dewan yang dimana persyaratan terakhir melibatkan kaum multietnis. (KNBS, 2021), (Nastiti & Iqbal, 2018).

Indonesia

Indonesia merupakan negara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Osenia serta berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Negara Indonesia juga disebut-sebut sebagai negara jantung dunia, Indonesia menjadi negara berpenduduk muslim terbanyak ke 4 dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Selain itu Indonesia kaya akan keanekaragaman seperti suku, bahasa, budaya dan agama. Itu semua melekat pada masyarakat Indonesia. Konon kepercayaan lokal atau mitosentris pun masih dipercaya dan itu tidak dapat dibantah. Sistem Pemerintahan Indonesia yaitu sistem pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis dimana terdapat pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif. Dimana tidak ada pertanggungjawaban bersama antara presiden dan anggotanya. Pembantu presiden terdiri dari menteri beserta jajarannya yang bertanggung jawab penuh kepada presiden. (KNBS, 2021).

SIMPULAN

Pada nyatanya, dalam perbandingan antara negara ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang berbeda satu sama lain. Karena setiap negara memiliki latar belakang proses sehingga terbentuknya sistem pemerintahan tersebut. Dengan adanya perbandingan sistem pemerintahan tersebut dapat menjalin kerja sama antar negara yang baik, bertujuan untuk menciptakan perdamaian dalam segala aspek. Kemudian, negara yang sistem pemerintahan demokrasi tetap harus menjamin bahwa rakyatlah yang hakikatnya pemilik negara dengan segala kewenangannya demi menjalankan seluruh fungsi kekuasaan negara, baik dalam bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Rakyat yang berhak merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta penilaian akan pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan tersebut dalam sistem pemerintahan. Lebih baik lagi untuk manfaat bagi rakyat segala aktivitas dan kegiatan lebih diutamakan. Seperti itulah sistem pemerintah yang demokrasi dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat, dan bersama rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asean, M. E., & Wangke, H. (2015). *Hubungan Internasional Peluang Indonesia Dalam*.
- Bangun, B. H. (2019). Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM Negara-Adiel INK Tambingon, Cs: Perbandingan Sistem Pemerintahan Page. 64

- Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi dan Kelembagaan. *Jurnal HAM*, 10(1), 99. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.99-113>
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2006). *Bab Iii Validasi Reabilitas*. 21–37.
- Nastiti, N. N., & Iqbal, F. M. (2018). Strategi Dan Tantangan : Rencana Pembangunan Sosial Dan Ekonomi Nasional Pemerintah Laos Tahun 2000-2020. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 3(1), 54. <https://doi.org/10.22303/pir.3.1.2018.54-75>
- Pasan, E. (2013). Politik Dinasti Dalam Pemilihan Presiden Di Filipina Tahun 2001-2011. *Interdependence*, Vol.1, 223.
- Rohman, M. F. (2019). Demokrasi Di Indonesia Hakikat Demokrasi Di Dalam Keberagaman. *Researchgate.Net*, October. https://www.researchgate.net/profile/Moh-Fatkur-Rohman/publication/336810326_Hakikat_Demokrasi_Di_Dalam_Keberagaman_Hakikat-Demokrasi-Di-Dalam-Keberagaman.p
- Yasman, D., Najeri, M., & Syahrin, A. (2003). Prospek Demokrasi di Myanmar Related papers. *Jurnal Universitas Paramadina*, 2(2), 128–141.